

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah karena mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Salpina *et al.*, 2023). Namun, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum merata akibat ketimpangan pembangunan dan belum optimalnya pengelolaan belanja daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas produksi, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas kebijakan fiskal dimaknai sebagai tingkat keberhasilan pengelolaan belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Efektivitas tersebut dilihat dari kemampuan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin besar dan signifikan pengaruh ketiga komponen belanja tersebut, maka semakin efektif kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi.

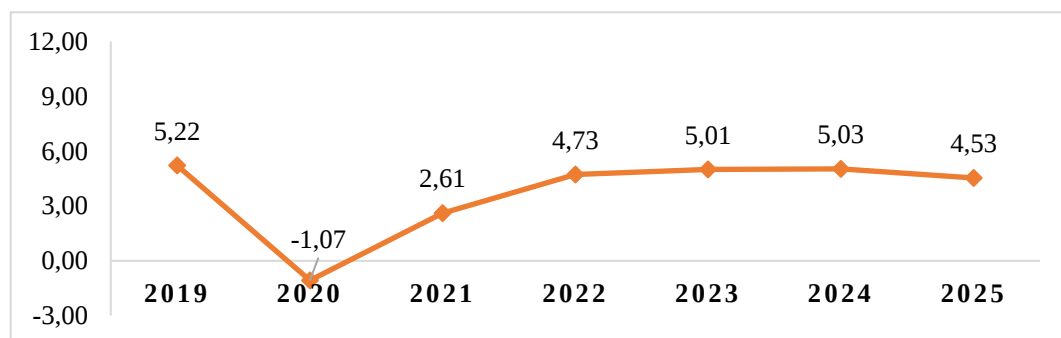
Perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan pasca pandemi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2025), pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,03% pada tahun 2024 menjadi 5,11% pada tahun 2025. Meskipun demikian, laju pertumbuhan tersebut masih berada pada kisaran 5% dan Indonesia tetap menghadapi berbagai tantangan struktural serta ketidakpastian ekonomi global.

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, rendahnya produktivitas, serta ketergantungan pada komoditas primer. Pramesty & Adianita (2023) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, seperti tingkat kemiskinan, kesempatan kerja, pengangguran, dan kebijakan fiskal pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan pengelolaan belanja pemerintah yang produktif menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah sesuai dengan potensi wilayahnya (Christia & Ispriyarso, 2019). Kewenangan tersebut menuntut pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, efisien, dan produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara dalam satu dekade terakhir, menunjukkan dinamika yang cukup beragam seiring dengan perubahan kondisi ekonomi nasional maupun global. Secara umum, aktivitas ekonomi daerah ini didukung oleh sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Hasibuan *et al.*, 2022). Namun demikian, berbagai tantangan seperti perlambatan ekonomi global serta dampak pandemi Covid-19

sempat mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Meski demikian, perekonomian Sumatera Utara secara bertahap mampu menunjukkan proses pemulihan seiring dengan meningkatnya aktivitas produksi dan perdagangan (BPS Sumatera Utara, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi daerah cukup baik, meskipun tetap memerlukan dukungan kebijakan fiskal daerah yang efektif untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Berikut disajikan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara (BPS Sumatera Utara, 2026).



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2025 (%)

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2026

Dilihat dari Gambar 1.1 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami kontraksi pada masa pandemi Covid-19, namun kembali menunjukkan tren positif selama periode pemulihan 2021-2025. Pada tahun 2019, perekonomian tumbuh sebesar 5,22% yang mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif stabil sebelum pandemi. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi menjadi -1,07% akibat menurunnya permintaan domestik, investasi, konsumsi rumah tangga, serta aktivitas produksi dan perdagangan sebagai dampak pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19.

Kontraksi tersebut menyebabkan menurunnya kontribusi sektor-sektor utama serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, sehingga memperlemah aktivitas ekonomi (Fitrawaty *et al.*, 2024). Memasuki tahun 2021, perekonomian mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 2,61% dan meningkat menjadi 4,73% pada tahun 2022 seiring pelonggaran pembatasan sosial dan stimulus fiskal pemerintah. Pemulihan tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas transportasi dan perdagangan sebesar 12,69% serta nilai ekspor sebesar 11,44% (BPS Sumatera Utara, 2023).

Kondisi ini berlanjut pada tahun 2023 ketika pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mencapai 5,01% dan meningkat menjadi 5,03% pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa perekonomian daerah tidak hanya pulih dari dampak pandemi tetapi juga berada pada kondisi pertumbuhan yang relatif stabil dan sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5% (BPS Indonesia, 2025). Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami perlambatan menjadi 4,53% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,03%. Meskipun demikian, sektor Transportasi dan Perdagangan masih mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,74%, sedangkan komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 10,24% sehingga tetap memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah (BPS Sumatera Utara, 2026).

Seiring dengan stabilnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada periode 2023-2025, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut melalui kebijakan fiskal. Simanjuntak *et al* (2025) menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan instrumen penting untuk mendorong aktivitas ekonomi

melalui penerimaan pajak, belanja pemerintah, transfer ke daerah, dan mekanisme pembiayaan.

Dalam kerangka fiskal, Korinek dan Stiglitz (2022) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Suprianik (2023) menyatakan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan menetapkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah yang efektif menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi anggaran pada berbagai sektor pembangunan (Nhemhafuki, 2023). Dalam penelitian ini, fokus kebijakan fiskal dibatasi pada komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal karena ketiga komponen tersebut merupakan bagian utama dalam struktur belanja daerah yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal merupakan komponen utama belanja pemerintah daerah yang memiliki peran berbeda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja pegawai mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, belanja barang dan jasa menunjang operasional pemerintahan dan aktivitas ekonomi, sedangkan belanja modal berkontribusi melalui

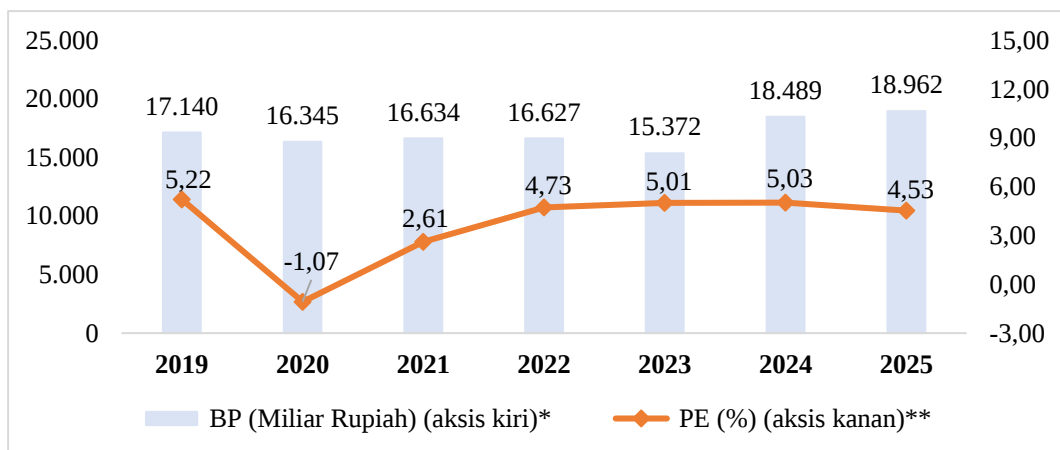
pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi. Oleh karena itu, optimalisasi ketiga komponen belanja tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fenomena empiris di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa perubahan belanja pemerintah tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang searah. Pada tahun 2020, misalnya, pertumbuhan ekonomi berkontraksi sebesar -1,07% meskipun realisasi belanja pemerintah masih relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan fakta empiris yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, menetapkan kebijakan fiskal daerah tercermin dalam struktur belanja APBD yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja tidak terduga. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal karena ketiga komponen tersebut berperan dalam mendukung pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Belanja pegawai merupakan komponen belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai kompensasi aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, menetapkan belanja pegawai termasuk dalam belanja operasi yang harus dianggarkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum, belanja pegawai merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara (Mawaddah *et al.*, 2024). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu (2026), mencatat belanja pegawai memiliki porsi belanja daerah terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan karakteristik pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia yang masih didominasi oleh belanja rutin untuk membiayai gaji, tunjangan, dan kompensasi aparatur sipil negara. Sehingga diperlukan pengelolaan belanja pegawai yang efisien agar pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Perkembangan belanja pegawai (BP) dan pertumbuhan ekonomi (PE) Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2025 disajikan pada Gambar 1.2 berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu dan BPS Sumatera Utara.



Gambar 1. 2 Perkembangan Belanja Pegawai (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi (%) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2025

Sumber: * DJPK Kemenkeu, 2026

** BPS Sumatera Utara, 2026

Dilihat dari Gambar 1.2 perkembangan belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2019-2025. Pada tahun 2019, belanja pegawai mencapai Rp17,1 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22%, yang mencerminkan kondisi perekonomian yang relatif stabil sebelum pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, belanja pegawai turun menjadi Rp16,3 triliun dan pertumbuhan ekonomi berkontraksi sebesar -1,07%. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penyesuaian belanja daerah, termasuk belanja pegawai, serta menurunnya aktivitas ekonomi akibat pembatasan mobilitas masyarakat (Meliana *et al.*, 2021). Hal tersebut mencerminkan kebijakan fiskal kontraktif melalui penyesuaian belanja pemerintah.

Pada tahun 2021, belanja pegawai meningkat menjadi sekitar Rp16,63 triliun dan pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh sebesar 2,61%. Peningkatan tersebut didukung oleh kebijakan fiskal ekspansif melalui program pemulihan ekonomi nasional, peningkatan belanja pemerintah, dan pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat (Indriani, 2023). Pada tahun 2022, belanja pegawai sedikit menurun menjadi Rp16,62 triliun, namun pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,73%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh faktor lain, seperti peningkatan aktivitas transportasi dan pergudangan sebesar 12,69% serta nilai ekspor sebesar 11,44% (BPS Sumatera Utara, 2023).

Pada tahun 2023, belanja pegawai menurun menjadi sekitar Rp15,3 triliun, namun pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,01%, didukung oleh

pertumbuhan sektor riil, konsumsi masyarakat, serta aktivitas transportasi dan perdagangan yang tumbuh sebesar 13,12% (BPS Sumatera Utara, 2024). Pada tahun 2024, belanja pegawai meningkat menjadi sekitar Rp18,48 triliun seiring pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian gaji dan tunjangan ASN serta kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja aparatur (Pemprov Sumatera Utara, 2024).

Pada tahun 2025, belanja pegawai meningkat menjadi sekitar Rp18,96 triliun, namun pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,53%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pegawai belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, yang juga dipengaruhi oleh melemahnya beberapa sektor strategis di tengah ketidakpastian ekonomi global. Meskipun demikian, pemerintah tetap menerapkan kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja daerah.

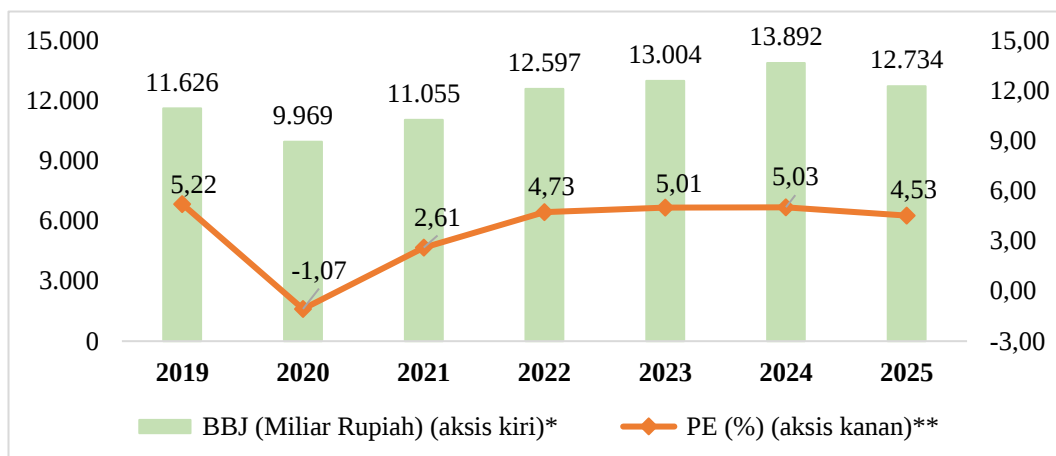
Realisasi belanja pegawai di Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 menunjukkan perbedaan yang cukup besar antar daerah. Daerah dengan realisasi belanja pegawai terendah adalah Kabupaten Nias Barat (Rp180,63 miliar), Kabupaten Pakpak Bharat (Rp245,89 miliar), Kota Gunungsitoli (Rp257,58 miliar), Kota Sibolga (Rp266,19 miliar), dan Kota Tanjung Balai (Rp275,81 miliar). Sementara itu, realisasi tertinggi terdapat di Kota Medan (Rp1,97 triliun), Kabupaten Deli Serdang (Rp1,35 triliun), Kabupaten Simalungun (Rp1,18 triliun), Kabupaten Langkat (Rp943,66 miliar), dan Kabupaten Mandailing Natal (Rp916,73 miliar) (DJPk, 2026). Perbedaan tersebut mencerminkan variasi

kapasitas fiskal, jumlah ASN, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing daerah.

Belanja barang dan jasa merupakan komponen penting dalam APBD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik. Pengeluaran ini mencakup kebutuhan rutin seperti alat tulis kantor, bahan bakar, perjalanan dinas, peralatan administrasi, serta pemeliharaan aset pemerintah (Permendagri No 15 Tahun, 2024). Selain itu, belanja ini mencakup pengadaan barang, pembayaran jasa, serta pemeliharaan yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir, Belanja barang dan jasa salah satu komponen penting dalam APBD yang mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik (Rahmanda et al., 2025). Secara umum, belanja barang dan jasa dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan administratif, pengadaan barang operasional, pemeliharaan sarana prasarana, serta pembayaran jasa pihak ketiga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Permendagri No 15 Tahun, 2024). Studi Mawaddah *et al.* (2024) dan Rahmanda *et al.* (2025) menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga optimalisasi pengelolaannya menjadi penting dalam mendorong pembangunan daerah.

Perkembangan belanja barang dan jasa (BBJ) dan pertumbuhan ekonomi (PE) Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2025 disajikan pada Gambar 1.3 berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu dan BPS Sumatera Utara.



Gambar 1. 3 Perkembangan Belanja Barang & Jasa (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi (%) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2025

Sumber: * DJPK Kemenkeu, 2026

** BPS Sumatera Utara, 2026

Dilihat dari Gambar 1.3 perkembangan belanja barang dan jasa di Provinsi Sumatera Utara berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama periode 2019-2025, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2025. Pada tahun 2019, belanja barang dan jasa mencapai sekitar Rp11,6 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22%, yang menunjukkan dukungan belanja pemerintah terhadap operasional pemerintahan dan aktivitas ekonomi daerah (Mawaddah *et al.*, 2024).

Pada tahun 2020, belanja barang dan jasa menurun menjadi sekitar Rp9,9 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar -1,07%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 (Tjahya & Asyik, 2022). Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal kontraktif melalui penyesuaian belanja pemerintah daerah.

Pada tahun 2021, belanja barang dan jasa meningkat menjadi sekitar Rp11 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,61%. Peningkatan ini didukung oleh kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja daerah dan program

pemulihan ekonomi (Mawaddah *et al.*, 2024). Pada tahun 2022, belanja barang dan jasa kembali meningkat menjadi sekitar Rp12,5 triliun seiring pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73%, didukung oleh pulihnya aktivitas ekonomi serta meningkatnya aktivitas transportasi dan perdagangan (Simamora *et al.*, 2024).

Pada tahun 2023, belanja barang dan jasa meningkat menjadi sekitar Rp13 triliun seiring pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01%, yang didukung oleh pemulihan ekonomi, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan sektor riil. (BPS Sumatera Utara, 2024). Pada tahun 2024, belanja barang dan jasa kembali meningkat menjadi sekitar Rp13,8 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03%, yang mencerminkan keberlanjutan kebijakan fiskal ekspansif dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pelayanan publik daerah. (Rahmanda *et al.*, 2025).

Pada tahun 2025, belanja barang dan jasa menurun menjadi sekitar Rp12,73 triliun, diikuti perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,53%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan belanja pemerintah dapat mengurangi aktivitas ekonomi daerah, yang turut dipengaruhi oleh melemahnya beberapa sektor ekonomi strategis di tengah ketidakpastian ekonomi global.

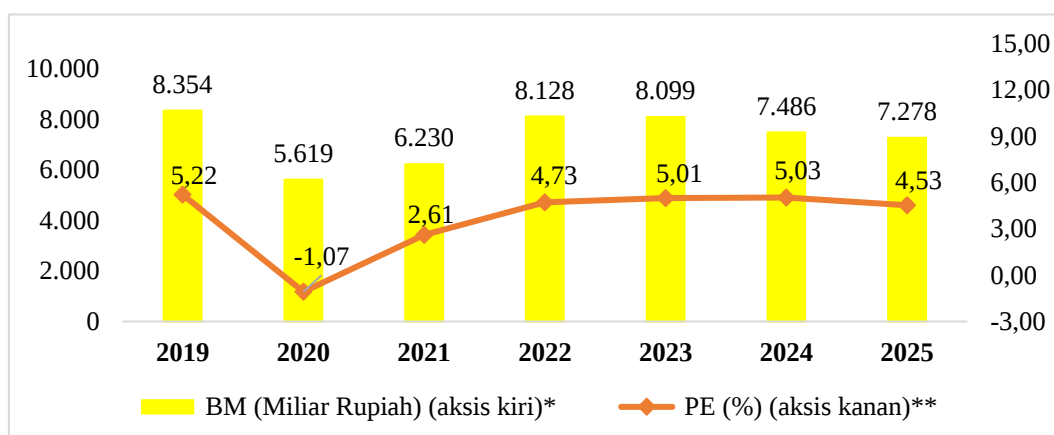
Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar daerah. Lima daerah dengan realisasi terendah adalah Kabupaten Nias Barat (Rp83,76 miliar), Kabupaten Pakpak Bharat (Rp120,29 miliar), Kabupaten Nias Selatan (Rp123,92 miliar), Kota Gunungsitoli (Rp130,33 miliar), dan Kabupaten Nias Utara (Rp156,01 miliar). Sementara itu, lima daerah dengan realisasi tertinggi adalah Kota Medan (Rp2,43 triliun), Kabupaten Deli Serdang (Rp1,11 triliun), Kabupaten Simalungun (Rp699,87 miliar), Kabupaten

Asahan (Rp643,69 miliar), dan Kabupaten Serdang Bedagai (Rp463,72 miliar) (DJPK, 2026). Perbedaan tersebut mencerminkan variasi kapasitas fiskal, jumlah penduduk, serta kebutuhan pelayanan publik di masing-masing daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode, seperti pembangunan infrastruktur, gedung, jalan, dan peralatan pelayanan publik (Rarun *et al.*, 2019). Belanja modal dipandang sebagai belanja produktif karena mampu meningkatkan kapasitas produksi, mendorong aktivitas sektor swasta, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur (Espinoza *et al.*, 2024).

Selama kurun waktu sekitar satu dekade, kondisi umum belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara cenderung meningkat meskipun berfluktuasi, seiring dengan bertambahnya kapasitas fiskal daerah yang didukung oleh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Namun, proporsi belanja modal masih lebih kecil dibandingkan belanja operasional sehingga perannya dalam mendorong pembangunan jangka panjang belum optimal. Hal ini sejalan dengan Malau *et al.* (2020) menyatakan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah, serta Zafnil (2026) menjelaskan bahwa alokasinya sering kali belum maksimal akibat dominasi belanja pegawai dalam struktur APBD.

Perkembangan belanja modal (BM) dan pertumbuhan ekonomi (PE) Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2025 disajikan pada Gambar 1.4 berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu dan BPS Sumatera Utara.



Gambar 1. 4 Perkembangan Belanja Modal (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi (%) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2025

Sumber: * DJPK Kemenkeu, 2026

** BPS Sumatera Utara, 2026

Dilihat dari Gambar 1.4 perkembangan belanja modal di Provinsi Sumatera Utara berfluktuasi selama periode 2019-2025. Pada tahun 2019, belanja modal mencapai sekitar Rp8,3 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22%. Namun, pada tahun 2020 belanja modal menurun menjadi sekitar Rp5,6 triliun seiring kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -1,07% akibat kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga sebagian anggaran pembangunan dialihkan ke sektor kesehatan dan bantuan sosial. (Yuniza *et al.*, 2022). Kondisi ini mencerminkan kebijakan fiskal kontraktif melalui pengurangan belanja pembangunan daerah.

Pada tahun 2021, belanja modal meningkat menjadi sekitar Rp6,2 triliun seiring pertumbuhan ekonomi sebesar 2,61%, didukung oleh kebijakan fiskal ekspansif melalui pembangunan infrastruktur dan pemulihan aktivitas ekonomi (Nurafni & Sembiring, 2024). Pada tahun 2022, belanja modal kembali meningkat menjadi sekitar Rp8,1 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73% seiring

normalisasi aktivitas ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2023 belanja modal mencapai sekitar Rp8,09 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01%, yang didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat serta pertumbuhan sektor transportasi dan perdagangan sebesar 13% (BPS Sumatera Utara, 2024).

Pada tahun 2024, belanja modal menurun menjadi sekitar Rp7,4 triliun, namun pertumbuhan ekonomi tetap meningkat menjadi 5,03% akibat pengalihan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 (Sari & Surayya, 2024). Pada tahun 2025, belanja modal kembali menurun menjadi sekitar Rp7,2 triliun seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,53%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan belanja modal berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, terutama pada sektor infrastruktur dan investasi, meskipun pemerintah tetap menerapkan kebijakan fiskal ekspansif.

Realisasi belanja modal di Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar daerah. Lima daerah dengan realisasi terendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat (Rp81,48 miliar), Kota Padang Sidempuan (Rp112,26 miliar), Kabupaten Padang Lawas Utara (Rp114,11 miliar), Kabupaten Tapanuli Utara (Rp128,39 miliar), dan Kota Gunungsitoli (Rp130,55 miliar). Sementara itu, lima daerah dengan realisasi tertinggi adalah Kota Medan (Rp1,01 triliun), Kabupaten Deli Serdang (Rp633,41 miliar), Kabupaten Simalungun (Rp381,78 miliar), Kabupaten Asahan (Rp283,36 miliar), dan Kota Pematangsiantar (Rp275,17 miliar) (DJPK, 2026). Perbedaan tersebut mencerminkan variasi kapasitas fiskal, kebutuhan pembangunan infrastruktur, luas wilayah, serta prioritas pembangunan masing-masing daerah.

Perkembangan ketiga komponen belanja daerah dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih beragam. Oleh karena itu, penting untuk menelaah penelitian terdahulu guna mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penelitian ini.

Berbagai penelitian, baik pada tingkat internasional maupun nasional, menunjukkan bahwa pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum konsisten. Sebagian penelitian menemukan pengaruh negatif atau tidak signifikan, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan pengaruh positif, terutama apabila belanja pemerintah dialokasikan secara efektif pada sektor-sektor produktif.

Pada tingkat internasional, penelitian Buthelezi (2023), Chu *et al.* (2020), dan Delgado (2023) menemukan bahwa belanja pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penelitian Sumandeeep *et al.* (2024) serta Lhajhouji *et al.* (2025) menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam jangka panjang.

Pada tingkat nasional, penelitian Rahmanda *et al.* (2025) dan Mawaddah *et al.* (2024) menemukan bahwa hanya belanja barang dan jasa yang berpengaruh positif signifikan, sedangkan belanja pegawai dan belanja modal tidak signifikan atau cenderung negatif. Sebaliknya, penelitian Fitri *et al.* (2026), Fifiyanti & Maryati (2025), dan Simanjuntak *et al.* (2025) menunjukkan bahwa belanja pegawai maupun belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan regresi data panel periode 2019-2025. Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh komponen belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sebagian penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu atau dua jenis belanja pemerintah, sedangkan penelitian ini menggunakan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal secara simultan. Penelitian terdahulu juga umumnya menggunakan periode dan lokasi penelitian yang berbeda, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih relevan dengan kondisi terkini di Provinsi Sumatera Utara serta menjadi dasar empiris dalam mendukung kebijakan alokasi belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini berfokus pada tiga komponen utama belanja pemerintah daerah, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang merupakan komponen dominan dalam struktur APBD Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dilakukan pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan periode penelitian tahun 2019-2025 yang mencakup masa pandemi Covid-19 hingga fase pemulihan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui pengaruh belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

4. Mengetahui pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap pengembangan kajian di bidang Ekonomi Pembangunan melalui analisis pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota.
2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang menyangkut pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah Sumatera Utara serta pemerintah kab/kota, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam pengelolaan belanja pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal.

2. Bagi pemerintah provinsi daerah lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi dalam mengelola struktur belanja daerah secara lebih efektif dan produktif, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.